

STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN POTENSI LOKAL DALAM PERSPEKTIF TEORI GROWTH POLE

REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH UTILIZING LOCAL POTENTIAL FROM THE PERSPECTIVE OF GROWTH POLE THEORY

Widia Novita Lukitasari. WA¹, Annis Erlitsya Marchelina², Anis Septiana³, Kiki Fitriyani Ali Zen⁴

¹Universitas Prof Dr Hafiz MPH, Cianjur, Indonesia

²Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

³Universitas Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah, Lampung, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 01

Page : 225-235

Published : 2026

KEYWORDS: *Regional development; growth pole; economic inequality; local potential; sustainable development.*

CORRESPONDENCE

Phone: +62812 7145 9896

E-mail: widianovita2511@gmail.com

ABSTRACT

Regional economic development in Indonesia continues to face the challenge of interregional disparities, particularly in provinces with high levels of inequality. One of the approaches proposed to address this issue is the Growth pole Theory, which argues that significant economic growth can be achieved by establishing growth centers in areas with the greatest development potential. This study aims to explore regional development strategies by utilizing local potential as a driving force for economic growth. The research employs a literature review method based on the concepts of regional and economic growth. The findings indicate that the implementation of the growth pole approach can generate positive spread effects on surrounding areas. However, it also poses the risk of backwash effects, which may exacerbate regional disparities if not properly managed. Therefore, the successful implementation of the growth pole approach requires equitable infrastructure development and improvements in human resource quality to ensure sustainable regional economic development.

PENDAHULUAN

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki banyak wilayah kabupaten dan kota yang mengakibatkan terjadinya perbedaan. Telah terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah dan disparitas yang tinggi di beberapa Propinsi di Indonesia. Berdasar masalah tersebut maka diperlukan adanya solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Salah satunya yaitu dengan cara menentukan daerah-daerah kutub pertumbuhan. Sesuai dengan teori Growth pole yang menyatakan bahwa untuk tumbuh

dengan cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat.

Perlu dorongan pertumbuhan sektor basis untuk mendorong pertumbuhan suatu wilayah. Hal ini karena pertumbuhan tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, yaitu sektor non basis. Sektor basis merupakan sektor yang menjual produknya ke luar wilayah atau kegiatan yang mendatangkan uang dari luar wilayah (Irmawati, 2015). Dengan identifikasi sektor unggulan ini diharapkan akan terjadi peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah *growth pole* melalui pemanfaatan potensi lokal, menurut Blakely mengemukakan bahwa basis dari pembangunan ekonomi regional adalah pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong tumbuhnya basis perekonomian baru. Setelah pengembangan daerah *growth pole* terjadi diharapkan akan terjadi perembetan atau imbas positif terhadap daerah-daerah di sekitar *growth pole*. Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan tertinggi, pada saat yang sama tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro 2003). Menurut Djojohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada melalui suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sesungguhnya sebuah pembangunan di suatu daerah pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di efisien dan efektif cara untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan sosial (Sarwono 2016).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif Teori *Growth pole* melalui pendekatan pembangunan daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal (*local-based development*), yang memandang bahwa pusat pertumbuhan tidak hanya dibentuk oleh konsentrasi industri besar atau investasi eksternal sebagaimana konsep klasik François Perroux, tetapi juga dapat tumbuh dari optimalisasi sumber daya lokal, komoditas unggulan, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, serta partisipasi masyarakat sebagai kekuatan endogen daerah. Penelitian ini mengintegrasikan Teori *Growth pole* dengan konsep *Endogenous Development* dan *Local Economic Development* untuk menghasilkan model strategi pengembangan daerah yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan keberadaan pusat pertumbuhan, tetapi juga menawarkan strategi yang mampu menciptakan *multiplier effect*, memperkuat daya saing wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis pada keunggulan lokal.

KERANGKA TEORI

Analisis ini membahas mengenai pengembangan wilayah dengan menggunakan Teori *Growth pole* sebagai landasan utama. Berikut penjabaran mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini:

1. Teori *Growth Pole* (Perroux, 1970)

Teori *Growth pole* atau teori pusat pertumbuhan diperkenalkan oleh Francois Perroux. Inti dari teori ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di semua wilayah pada waktu

yang sama. Sebaliknya, pertumbuhan terpusat di beberapa daerah yang disebut pusat pertumbuhan (growth poles). Beberapa poin utama dari teori ini meliputi:

Wilayah pusat pertumbuhan merupakan simpul ekonomi yang sangat atraktif karena dimotori oleh klaster industri unggulan yang kompetitif. Industri-industri utama di dalamnya mempunyai relasi rantai pasok yang kuat, mencakup kaitan ke depan dan ke belakang dengan berbagai sektor penunjang lain, yang pada akhirnya menjadi motor penggerak kemajuan wilayah.

Pemusatan aktivitas industri ini tidak hanya mempercepat ekspansi ekonomi dan melahirkan efek sebar (spread effect) yang menguntungkan kawasan sekitar, tetapi juga menyimpan potensi risiko. Apabila gagal dikelola secara bijak, kondisi ini justru memunculkan backwash effect yakni efek balik yang merugikan berupa tersedotnya potensi sumber daya daerah hinterland ke pusat, sehingga memperparah ketimpangan pembangunan antardaerah.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional (Arsyad, 1999)

Menurut Arsyad, pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Teori ini menekankan pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam upaya pengembangan daerah.

3. Teori Basis Ekonomi (Blakely, 1994)

Teori ini menyatakan bahwa sektor basis (sektor yang menjual produknya ke luar wilayah) merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan sektor basis akan menimbulkan efek domino pada sektor-sektor non-basis, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Blakely juga menekankan bahwa basis dari pembangunan ekonomi regional adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong basis perekonomian baru.

4. Teori Disparitas Wilayah (Hirschman, 1958)

Menurut Albert Hirschman, ketidakseimbangan pertumbuhan antarwilayah merupakan konsekuensi dari perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap wilayah. Teori ini memperkenalkan dua efek penting:

Trickling down effect: Dampak positif di mana pertumbuhan di pusat pertumbuhan menyebar ke wilayah sekitarnya, mendorong pengembangan daerah yang lebih lemah.

Polarization effect: Dampak negatif di mana pertumbuhan di wilayah pusat justru menarik sumber daya dari daerah sekitarnya, memperburuk ketimpangan.

5. Teori Pembangunan Wilayah (Friedmann & Alonso, 2008)

Friedmann dan Alonso berpendapat bahwa pengembangan wilayah perlu berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal, seperti sumber daya alam, pasar, tenaga kerja, dan teknologi. Mereka menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan wilayah dengan dukungan investasi dan infrastruktur.

6. Teori Perencanaan Pembangunan Daerah (Todaro, 2003)

Menurut Michael Todaro, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada penciptaan pertumbuhan setinggi mungkin tetapi juga harus berupaya mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Pembangunan harus menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Dapat disimpulkan dari teori-teori di atas digunakan sebagai landasan dalam mengkaji strategi pengembangan daerah melalui pendekatan Growth Pole. Fokus utama adalah bagaimana memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya sekaligus mengurangi ketimpangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji strategi pengembangan daerah melalui pemanfaatan potensi lokal dalam perspektif *Growth pole Theory* yang dikemukakan oleh François Perroux. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan pembangunan daerah, ekonomi regional, dan teori pusat pertumbuhan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi, mengidentifikasi, dan mengkaji literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis untuk mengidentifikasi hubungan antara pemanfaatan potensi lokal, pembentukan pusat pertumbuhan (*growth pole*), serta implikasinya terhadap pengembangan wilayah. Untuk meningkatkan keabsahan hasil kajian, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan sehingga diperoleh interpretasi yang komprehensif dan objektif (Creswell & Creswell, 2018; Snyder, 2019; Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, pengembangan wilayah berasal dari 2 kata, yaitu pengembangan dan wilayah. Pengembangan merupakan kemampuan yang bersumber dari apa yang dapat dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan agar meningkatnya kualitas hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan adalah adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan dan kemampuan yang dimiliki untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik (Alkadri, 2001). Terdapat pendapat berbeda mengenai definisi pengembangan, menurut Budiharsono (2002) pengembangan merupakan suatu proses menciptakan potensi yang memunculkan potensi-potensi baru dari potensi-potensi yang terbatas, dan juga termasuk mencari potensi berbeda dari beragam kelompok yang mempunyai potensi yang berbeda. Sedangkan kata wilayah itu sendiri merupakan satuan geografis yang memiliki penajaman tertentu dimana di dalamnya terdapat interaksi antar komponen wilayah secara fungsional, sehingga sifat batasan wilayah dapat bersifat dinamis tidak mesti bersifat fisik dan pasti atau statis (Rustiadi et al, 2001). UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan komponen-komponen terikat dengan batas dan sistem dengan dasar penentuannya adalah aspek administratif dan fungsional. Jadi pengembangan wilayah adalah proses untuk meningkatkan kualitas wilayah dengan cara meningkatkan potensi yang dimiliki serta memunculkan potensi baru.

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan additional value (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang

terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu pengembangan daerah sekitarnya (Pratama & Ciptawaty, 2022; Juliannisa et al., 2022; Defriza et al., 2022).

Zen dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai suatu bentuk hubungan yang tercipta antara sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara harmonis dengan mempertimbangkan daya tampung.

Perroux (1970) mendefinisikan sebuah kutub pertumbuhan sebagai suatu kumpulan industri yang akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena industri-industri tersebut mempunyai kaitan kemuka (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat dengan industri unggul. Dia mengatakan bahwa kumpulan industri cenderung untuk memilih lokasi yang memusat pada kota-kota besar dan didukung oleh sebuah daerah belakang (*hinterland*) yang kuat. Sebuah wilayah potensial merupakan wilayah yang kurang berkembang atau tidak berkembang sama sekali tetapi memiliki faktor-faktor yang dapat menyebabkan untuk mengembangkan cepat jika ada perkembangan (Sukirno 1985).

Perroux (1970) mengatakan pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan. Inti dari teori Pusat Pertumbuhan adalah sebagai berikut, pertama dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut. Kedua, pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Ketiga, perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Adanya *growth pole*, akan menimbulkan *trickling down* dan *polarization effects* suatu pertumbuhan ekonomi. *Trickling down* dan *polarization effects* suatu pertumbuhan ekonomi ditemukan oleh Hirschman (1958). Ia berpendapat bahwa karena potensi sumber daya yang tidak seragam dan tidak merata antara region satu dengan region lainnya maka region-region dalam sebuah negara akan tumbuh tidak sama dan tidak seragam. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat. Apabila region-region kuat ini telah tumbuh maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi region-region yang lemah. Perembetan pertumbuhan ini bisa berdampak positif (*trickling down effects*), yaitu adanya pertumbuhan region yang kuat dan menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah yang masih menganggur atau mungkin region yang lemah menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang lebih kuat. Sedangkan dampak negatif (*polarization effect*) terjadi kalau kegiatan produksi di region yang kuat bersifat kompetitif dengan produk region yang lemah, yang sebenarnya membutuhkan pembinaan.

Friedman dan Alonso (2008) berpendapat bahwa untuk jangka panjang dalam pengembangan wilayah menjadi lebih penting bagi masyarakat untuk mengenal potensi sumber daya dan potensi pengembangan lokal wilayah khususnya potensipotensi yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, tidak terkecuali pengurangan angka kemiskinan, dan juga hambatan pembangunan daerah dapat teratasi dalam rangka meraih tujuan dari pembangunan.

Berikut adalah 7 hal penting dalam pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah menurut Friedman dan Alonso (2008) :

Sumber daya lokal : sumber daya lokal merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan karena sumber daya lokal merupakan kondisi alam yang dimiliki wilayah yang sifatnya berasal dari dalam daerah itu sendiri dan dapat memberi nilai positif bagi daerah, selain itu sumber daya lokal juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing. Contohnya adalah keberadaan barang tambang yang melimpah, tanah yang subur, dan lain sebagainya.

Pasar : Pasar merupakan tempat bagi daerah untuk memasarkan produk yang dihasilkan wilayah tersebut dalam proses produksi

Tenaga kerja : merupakan sumber daya yang bertugas sebagai pengolah sumber daya lokal yang fungsinya adalah meningkatkan nilai jual produk yang berasal dari hasil proses produksi wilayah tersebut

Investasi : dalam mengembangkan wilayah memerlukan investasi berupa penanaman modal dalam setiap kegiatannya. Semakin stabil kondisi wilayah dan meningkat atau dengan kata lain kondusif maka akan semakin besar investasi yang masuk.

Kemampuan pemerintah : kehadiran pemerintah dianggap penting dalam pengembangan wilayah karena pemerintah mempunyai peran sebagai pengarah, selain itu pemerintah juga sebagai katalisator pembangunan

Transportasi dan komunikasi : mengingat pentingnya wilayah satu dan wilayah lainnya untuk terhubung membuat peran transportasi dan komunikasi menjadi penting. Dengan adanya penghubung yang baik antara wilayah satu dan lainnya dapat menimbulkan terciptanya arus pergerakan barang, jasa, dan informasi dengan begitu akan memberi pengaruh juga terhadap pengembangan wilayah.

Teknologi: teknologi menjadi komponen penting karena teknologi dapat membantu proses produksi di wilayah agar menghasilkan output dan kinerja yang meningkat.

Riyadi (2002) berpendapat bahwa dalam keberhasilan pengembangan wilayah terdapat 3 faktor, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Produktivitas dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur dengan ada tidaknya perkembangan produktivitas institusi termasuk aparat yang ada di dalamnya. Efisiensi dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat diukur berdasarkan adanya jaminan terhadap suatu program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di suatu wilayah. Wilayah satu dan lainnya berbeda, perbedaan tersebut terdapat pada keadaan politik sosial, kelembagaan, komitmen dan kemampuan dari aparat dan masyarakat pada wilayah tersebut. Sehingga agar terlaksananya pembangunan yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi warganya dan juga berkelanjutan harus mempunyai kemampuan untuk berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi seluruh kepentingan, dan mempunyai kreativitas yang inovatif.

Teori *growth pole* merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak dijalankan di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Pada awalnya konsep ini dianggap penting karena memberikan kerangka rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi regional di wilayah pusat (kota) dan *hinterland*-nya. Akan tetapi, faktanya tidak seperti yang diharapkan karena dampak *backwash effect* lebih besar daripada *spread effect* sehingga pengurasan sumber daya *hinterland* oleh pusat menjadi sangat menonjol dan mendorong ketimpangan yang makin lebar.

Idealnya, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi

ketimpangan pendapatan, menekan tingkat pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Aulia et al., 2023; Sari & Kuncoro, 2022).

Konsep *growth pole* telah lama diadopsi sebagai salah satu strategi pembangunan di Indonesia dengan harapan mampu menciptakan efek penyebaran (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya. Namun, implementasinya masih menunjukkan dominasi *backwash effect*, yaitu terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah (Pratama & Ciptawaty, 2022; Putra et al., 2024). Kondisi tersebut tercermin dari berkembangnya kawasan metropolitan seperti Jabodetabek dan Gerbangkertosusila yang terus mengalami ekspansi perkotaan (*urban sprawl*) dan menarik arus migrasi dari wilayah hinterland. Akibatnya, terjadi ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan antara kota-kota utama dengan daerah di sekitarnya, sehingga masyarakat cenderung bermigrasi menuju pusat-pusat pertumbuhan untuk memperoleh kesempatan kerja dan penghidupan yang lebih baik (Fauzi et al., 2023; Putra et al., 2024).

Beberapa hasil kajian, di antaranya hasil penelitian Sukwika (2018) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat kesenjangan ekonomi (PDRB per kapita) antarprovinsi selama periode 2011–2015 yang diperlihatkan oleh angka Indeks Williamson sebesar 0,7. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Mahardiki & Santoso (2013) yang menunjukkan bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antarprovinsi di Indonesia selama periode 2006–2011 mencapai nilai 0,796. Di luar infrastruktur, Indonesia perlu melakukan pemerataan kualitas SDM jika hendak mengurangi ketimpangan antarwilayah. Penyediaan pendidikan yang lebih baik secara merata di berbagai wilayah di Indonesia akan memberikan akses lebih besar bagi setiap generasi muda di setiap wilayah untuk mampu meningkatkan kualitas SDM. Semua orang memiliki kesempatan sama untuk mendapat pendidikan.

Sementara berdasarkan hasil penelitian Rusdiarti (2016) menunjukkan tidak semua kecamatan di kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan. Beberapa daerah yang memiliki sektor unggulan diantaranya adalah Kecamatan Wanareja hanya memiliki satu sektor unggulan yaitu pertanian. Kedua adalah Kecamatan Kawunganten memiliki dua sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kecamatan Kampung Laut, dimana sektor pertanian pada kecamatan ini sangatlah unggul. Kecamatan kesugihan juga memiliki satu sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Kecamatan yang kelima yaitu Kecamatan Sampang, unggul dalam sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Keenam adalah Kecamatan Kroya unggul dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketujuh yaitu Kecamatan Cilacap Selatan, sektor pertambangan dan penggalian di wilayah ini termasuk unggul. Cilacap tengah memiliki banyak sektor unggulan, diantaranya adalah sektor Industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan serta sektor jasa-jasa. Dan Kecamatan Cilacap Utara, sektor yang tergolong unggul dalam kecamatan ini adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Hasil penelitian berikutnya adalah penelitian Emalia dan Farida (2018) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah mana yang cepat maju dan tumbuh di Provinsi Lampung, untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung, dan untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang memiliki nilai interaksi spasial tertinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung

Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah yang termasuk kategori cepat maju dan tumbuh di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung. Serta Kota Bandar Lampung memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Pesawaran. Selain itu Kabupaten Lampung Tengah memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan memiliki interaksi spasial tertinggi dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata. Di perkotaan, pendidikan bisa dijangkau dengan mudah mulai dari SD, SMP, hingga SMA/K. Sebaliknya, jenjang pendidikan di setiap perdesaan sebagian besar hanya ada tingkat SD. Ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA/K, mereka harus keluar dari perdesaan dan membutuhkan waktu untuk menempuh perjalanan jauh menuju ke sekolah. Selain akses jalan yang jauh, biaya pendidikan mahal juga menjadi alasan mereka di perdesaan tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke jenjang berikutnya. Mereka lebih memilih bekerja setelah lulus tingkat sekolah dasar. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan masyarakat kota lebih tinggi daripada di desa. Semakin tinggi jenjang pendidikan, masyarakat desa makin tertinggal. Data menunjukkan 60% penduduk perkotaan tamat SMP/ sederajat. Sebaliknya, lebih dari separuh penduduk perdesaan berpendidikan rendah (tidak/hanya tamat SD dan tidak pernah sekolah). Dengan begitu, rata-rata lama sekolah mereka yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Penduduk perkotaan secara rata-rata menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau kelas 7.

Proses pemerataan kualitas SDM dengan pemerataan infrastruktur memiliki keterkaitan erat dalam menunjang pemerataan pertumbuhan di berbagai daerah. Tak heran jika kualitas SDM di Indonesia masih belum merata, mengingat pembangunan sejumlah infrastruktur di beberapa daerah juga masih belum merata. Banyak daerah di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan fasilitas transportasi maupun fasilitas jaringan. Pemerintah perlu terus berjuang untuk memungkinkan akses transportasi, jaringan listrik, maupun jaringan internet bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia berhak mendapat akses yang sama di mana pun mereka berada.

Dukungan pemerintah untuk menciptakan *spread effect* dari konsep *growth pole* dapat dicapai melalui pemberian insentif oleh pemerintah bagi wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Memasukkan peran daerah sebagai pusat pertumbuhan dalam formula dana transfer, terutama karena menanggung daerah lain, bisa dijadikan insentif daerah. Selain itu, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dengan dasar Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai serta pemerataan kualitas SDM di setiap daerah, maka diyakini ketimpangan ekonomi akan bisa ditekan. Sejak 2016 hingga 2018, ICOR sebagai ukuran efisiensi investasi di Indonesia mengalami perbaikan, yakni mencapai level 6,3%. Meski demikian, angka ini masih jauh lebih besar dibandingkan negara sekawasan. Diketahui, ICOR Malaysia pada periode yang sama hanya berada di level 4,6%, disusul Thailand sebesar 4,5%, dan terendah Filipina sebesar 3,7%. Semakin rendah ICOR itu menunjukkan bahwa investasi di wilayah tersebut semakin efisien.

Data di atas cukup menjadi cermin bagi Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan konsep pembangunan. Konsep *growth pole* memerlukan dukungan pemerataan pembangunan infrastruktur. Tetapi, pemerataan pembangunan infrastruktur bisa menjadi hal yang sia-sia jika dilakukan tanpa diikuti dengan perbaikan SPM di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan efektivitas kualitas pengelolaan belanja di setiap daerah

KESIMPULAN

Konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh konsep ruang ekonomi (economic space) yang dikemukakan oleh Francois Perroux. Perroux menyatakan bahwa, pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan akan muncul pada kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula. Teori Perroux yang dikenal dengan istilah pusat pertumbuhan (growth of pole) merupakan teori yang menjadi dasar strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan diberbagai negara saat ini. Adanya pengembangan wilayah pada pusatpusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah disekitarnya, karena pusatpusat pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya spread effect (efek sebar) dari daerah kegiatan pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya, sehingga daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Perroux pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi, baik ke dalam maupun ke luar. Apabila dilihat secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction) yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya konsep pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh Francois Perroux didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi serentak di seluruh wilayah, melainkan berpusat pada kutub-kutub pertumbuhan tertentu dengan intensitas yang bervariasi. Teori Growth pole ini telah menjadi landasan dalam strategi pembangunan industri di berbagai negara, khususnya untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah. Pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sendiri, tetapi juga menciptakan spread effect (efek sebar) ke daerah sekitarnya, yang memungkinkan wilayah-wilayah tersebut turut tumbuh dan berkembang. Perroux mendefinisikan pusat pertumbuhan dengan dua pendekatan:

Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi karena adanya konsentrasi industri yang dinamis dan memiliki keterkaitan erat, sehingga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi baik secara internal maupun eksternal.

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi dengan infrastruktur yang lengkap dan kemudahan akses, yang menarik pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong penduduk untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Pengembangan wilayah melalui konsep growth pole dapat menjadi strategi efektif untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang terfokus dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah sekitarnya melalui efek penyebaran.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Aulia, R., Hidayat, T., & Nugroho, S. (2023). Inclusive economic growth and regional inequality in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(2), 155–170.

- Blakely, Edward James. 1994. *Planning local economic development theory and practice*, 2nd ed. Australia: Thousand Oaks : Sage Publications.
- Defriza, R., Tanjung, M. H., & Astuti, P. (2022). Pengaruh kawasan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*. <https://doi.org/10.25299/jurps.2022.9048>
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Penerbit PT. Pustaka LP3ES.
- Fafurida. 2010. “Kajian Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi dalam Rangka Memperkokoh Perekonomian Nasional.” *Proceeding. FE Universitas Sebelas Maret*.
- Fauzi, A., Rustiadi, E., & Pravitasari, A. E. (2023). Urbanization, metropolitan expansion, and regional development disparities in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 34(3), 245–261.
- Hirschman, Albert O. 1958. *The strategy of economic development in developing countries*. Yale University Press. New Haven, Connecticut, USA.
- Hoover, Edgar Malone. 1984. *An Introduction to regional economics*, 2nd ed. Knopf, new york: Alfred A. Knopf, Inc.
- Irmawati, Setyani. 2015. “Analisis Industri Unggulan di Provinsi Jawa Tengah.” *JEJAK* 8 (2): 224–37.
- Juliannisa, I. A., Artino, A., Maulana, A., & Sikumbang, H. (2022). Analisa konsep pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Cilacap. *Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 56–78. <https://doi.org/10.35590/jeb.v9i1.4505>
- Perroux, F. 1970. “Economic space: theory and applications.” *Quarterly Journal of Economics* 64: 89–104.
- Pratama, A. D., & Ciptawaty, U. (2022). Economic spatial patterns and Human Development Index districts and cities in five Southern Sumatera provinces. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(2), 192–208. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i2.36430>
- Putra, R. A., Sari, D. P., & Nugraha, A. (2024). Growth pole, spatial inequality, and regional development in Indonesia: A review. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 12(1), 1–18.
- Rusdiarti, 2016, “Strategi Pengembangan Daerah *Growth pole* Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Volume 19 No. 3, esember 2016, ISSN 1979 - 6471*
- Sari, D. P., & Kuncoro, M. (2022). Inclusive development and regional economic performance in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45–61.
- Sarwono. 2016. “Analysis of economic growth factors in West Pantura areas of Central Java.” *JEJAK* 9 (2): 145–58.

- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan – Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LP3ES-UI dengan Bina Grafika.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia, 6,. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>.
- Todaro, Michael P. 2003. *Economic development eight edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.